



Krisis Keamanan Internasional yang Diciptakan oleh Pemilu Myanmar dan Kudeta Militer

Zacky Ahmad Fauzy

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin

Korespondensi penulis : fauzyzackyahmad@gmail.com

Abstract : *The political crisis in Myanmar following the 2020 election and the 2021 military coup has created instability in both domestic and international security. This study employs a qualitative method with a literature review approach to analyze the impact of the coup on regional security and ASEAN's response. The findings reveal that the coup led by General Min Aung Hlaing's military junta not only threatened Myanmar's democracy but also triggered human rights violations, economic crisis, and refugee exodus. ASEAN, through mechanisms such as the ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR), has attempted to mediate the conflict using a non-interventionist approach, yet its effectiveness is considered weak compared to sanctions imposed by Western countries such as the United States and the European Union. The main challenges for AIPR include its limited mandate, divergent interests among member states, and ASEAN's principle of respecting national sovereignty. This study concludes that a sustainable solution requires a multidimensional approach involving both international pressure and inclusive dialogue with all stakeholders in Myanmar.*

Keywords: ASEAN, AIPR, International Security, Military Coup, Non-Intervention.

Abstrak : Krisis politik di Myanmar pasca-pemilu 2020 dan kudeta militer 2021 telah menciptakan ketidakstabilan keamanan domestik maupun internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis dampak kudeta terhadap keamanan regional serta respons ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kudeta yang dilancarkan oleh junta militer pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing tidak hanya mengancam demokrasi Myanmar tetapi juga memicu pelanggaran HAM, krisis ekonomi, dan eksodus pengungsi. ASEAN, melalui mekanisme seperti *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR)*, berupaya memediasi konflik dengan pendekatan non-intervensi, namun efektivitasnya dinilai lemah dibandingkan sanksi dari negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Tantangan utama AIPR adalah keterbatasan mandat, perbedaan kepentingan negara anggota, serta prinsip ASEAN yang menghormati kedaulatan nasional. Studi ini menyimpulkan bahwa solusi berkelanjutan memerlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan tekanan internasional sekaligus dialog inklusif dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar.

Kata kunci: Kudeta Militer, ASEAN, AIPR, Keamanan Internasional, Non-Intervensi.

1. PENDAHULUAN

Myanmar merdeka dari Inggris pada tahun 1948 dipimpin oleh U Nu. Myanmar setelah mengalami ketidakstabilan politik yang diakibatkan oleh konflik internal yang didominasi oleh militer (Oktapia & Eresiah, 2024) Myanmar dipimpin oleh pemerintahan militer selama hampir 26 tahun namun hasil yang diperoleh negara tidak kunjung baik. Pemerintahan yang otoriter membuat kondisi sosial, ekonomi, hingga politik negara tidak stabil, banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah (Awaludin dkk., 2024). Pada tahun 2020, Myanmar mengadakan pemilu yang dimenangkan oleh Partai Liga Demokrasi (NLD) dengan perolehan suara sebanyak 83%. Namun pihak militer menyanggah suara tersebut dan menganggap tidak sah karena menemukan kecurangan (Keumala & Ath-Thariq, 2023). Akibat dari kecurangan yang terjadi, Aung San Suu Kyi

ditangkap serta jajaran pejabat tinggi negara ditangkap dan pemerintahan Myanmar kembali jatuh kepada junta militer setelah terjadi kudeta (Oktapia & Eresiah, 2024).

Kudeta yang dilakukan oleh Junta militer terjadi pada tahun 2021. Kudeta adalah sebuah aksi penggulingan kekuasaan pada sebuah pemerintahan negara yang bersifat brutal dengan melakukan penyerangan kepada pemerintahan dengan bermaksud untuk menggantikan pemerintahan yang digulingkan (Amir & Melani, 2024). Saat setelah terjadi kudeta di Myanmar, banyak terjadi tindakan brutal kepada demonstran pro-demokrasi (Ashadi, 2022). Kudeta yang terjadi diikuti dengan adanya peraturan jam malam, pembatasan akses internet, menggeser kerumunan, dan menggunakan kekerasan kepada demonstran seperti menggunakan kendaraan lapis baja untuk menekan aksi protes (Yasa, 2022).

Kudeta yang terjadi di Myanmar tidak hanya berdampak kepada keamanan penduduknya namun hal itu juga berdampak kepada keamanan internasional. Kudeta di Myanmar membuat ASEAN sebagai organisasi internasional mengambil sikap terhadap peristiwa yang terjadi. Ketua ASEAN, Brunei Darussalam, memberitahu kepada Myanmar untuk mengupayakan diskusi dengan pada demonstran dan mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan pemerintahan yang baik (Yasa, 2022). Upaya yang dilakukan oleh ASEAN masih dianggap lemah dibandingkan dengan negara di luar ASEAN seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Uni Eropa seperti menjatuhkan sanksi kepada Myanmar, memutuskan diplomatik dengan pemerintahan junta militer, hingga menghentikan bantuan kepada Myanmar (Yasa, 2022).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu pendekatan luas yang memiliki banyak metode dalam penggunaannya (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini menggunakan studi pustaka terkait dengan topik yang diangkat yaitu krisis keamanan internasional yang diciptakan oleh pemilu Myanmar dan kudeta Militer melalui pengumpulan sumber seperti *e-journal*. Analisis data dilakukan dengan memastikan literatur yang dibaca memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat.

3. PEMBAHASAN

Pemilu Myanmar

Setelah melakukan pemerintahan di bawah militer, Myanmar melaksanakan pemilu pada tahun 2010. Pada kala itu, partai NLD dan beberapa partai etnik lainnya menolak hasil pemilu pada tahun 2008 dan memboikot pemilu dengan itu partai USDP memenangkan banyak kursi di parlemen sebanyak 388 kursi dari 498 kursi yang tersedia (Huang, 2022). Di Myanmar partai etnik yang dominan diisi oleh sipil lebih cenderung mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan partai yang kuat. Pada tahun 2010, partai NLD tidak ikut dalam pemilu sehingga pemilu berjalan dengan sungguh-sungguh dan partai etnik memenangkan pemilu. Demokrasi di Myanmar mengalami kebekuan akibat pemerintahan yang didominasi oleh militer yang tidak memberikan kebebasan pada masyarakat sipil (Rugian dkk., 2022)

Pada pemilu tahun 2015, kemenangan diraih oleh partai yang didominasi oleh partai etnik sipil yang membangkitkan sistem demokrasi di Myanmar (Khaldun, 2021). Presiden saat itu, Thein Sein, mengeluarkan beberapa kebijakan salah satunya adalah pembebasan Aung San Suu Kyi dan dijadikan sebagai ketua partai NLD (Khaldun, 2021). Kemudian pada tahun 2015, pemilu kembali dilaksanakan dengan banyak partai etnis mulai berkembang baik karena peristiwa pemilu 2010. Partai NLD kembali mengikuti pemilu 2015 dan memenangkan pemilu. Kemenangan yang diraih oleh NLD memunculkan harapan rakyat agar demokrasi Myanmar kembali hidup dan memberikan ruang kepada masyarakat (Rugian dkk., 2022).

Pemilu kembali dilaksanakan pada tahun 2020 dengan partai NLD kembali memenangkan pemilu dan Aung San Suu Kyi dijadikan sebagai presiden menandakan akhir dari kekuasaan militer di Myanmar (Khaldun, 2021). Tetapi di sisi lain, pada tahun 2021, militer mencoba untuk melakukan penggerakan untuk menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi dengan menguasai kota Yangon (Rugian dkk., 2022). Pergerakan yang dilakukan dengan militer, membuat sistem demokrasi di Myanmar menjadi terancam.

Kudeta Militer di Myanmar

Pada 2021 Februari, kudeta terhadap pemerintahan dilakukan oleh Tatmadaw atau angkatan bersenjata militer Myanmar. Tatmadaw mengambil alih pemerintahan serta aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat sipil di Myanmar (Yasa, 2022). Kudeta adalah kegiatan untuk merebut pemerintahan secara ilegal dengan melibatkan kekerasan kepada warga sipil (Ashadi, 2022). Kudeta dapat terjadi akibat adanya dukungan kuat dari

angkatan bersenjata dalam suatu negara (Ashadi, 2022). Salah satu negara yang mengalami konflik kudeta saat ini adalah Myanmar.

Sebelumnya pada tahun 2015, pemerintahan berhubungan baik dengan militer Myanmar, namun Jenderal Min Aung Hlaing yang saat itu menjabat sebagai kepala militer terus berusaha untuk menghentikan partai NLD mengubah konstitusi yang membatasi militer di Myanmar (Amir & Melani, 2024). Alasan dibalik dilakukannya kudeta adalah militer Myanmar menduga adanya kecurangan pada pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2020 (Khaldun, 2021). Bukan pertama kalinya Jenderal Min Aung Hlaing melakukan kudeta, pada tahun 1970 terjadi kudeta yang diinisiasi oleh Jenderal Min Aung Hlaing dan mengalami peningkatan dalam kapabilitas diri saat ia memutuskan bergabung dengan militer sehingga mampu meraih jabatan sebagai panglima tertinggi bersenjata (Ashadi, 2022).

Kemenangan oleh partai NLD tidak menghentikan Jenderal Min Aung Hlaing untuk menyuarkan usaha kudetanya melalui media sosial. Namun usahanya tidak berakhir baik sebab akun media sosial yang digunakan dihapus oleh pihak berwenang (Ashadi, 2022). Hal ini disebabkan oleh peristiwa pembantaian kepada suku Rohingya tahun 2017 yang mengakibatkan kurang lebih 750.000 jiwa mengungsi ke negara ketiga.

Kudeta pada tahun 2021 oleh Tatmadaw dilandasi oleh beberapa hal seperti kecurangan pemilu, pelanggaran HAM (termasuk genosida Rohingya), korupsi, penyelundupan alat komunikasi, provokasi anti-militer, dan ketidakpatuhan aturan kesehatan selama kampanye (Ashadi, 2022). Selain itu, ambisi Jenderal Min Aung Hlaing untuk melakukan kudeta adalah untuk mengembalikan Myanmar kepada kepemimpinan otoriter (Saputra & Dewi, 2025).

Keamanan Militer Internasional

Myanmar sudah mengalami masa kudeta semenjak 1962, kemudian berlanjut pada tahun 1988, dan terakhir dilakukan pada tahun 2021 (Fransisca & Budiarto, 2024). Peristiwa ini menjadi pusat perhatian seluruh dunia terlebih lagi peristiwa Myanmar yang terjadi selama bertahun-tahun. Etnis Rohingya menjadi sasaran militer Myanmar seperti pembunuhan massal, pemerkosaan, pembakaran desa, dan pengusiran etnis yang diakui oleh organisasi internasional sebagai pembersihan etnis (Anggraeni & Ridwan, 2025). Akibat dari peristiwa di Myanmar, banyak kebijakan yang diberikan oleh negara-negara besar di luar ASEAN sebagai ancaman.

Amerika Serikat menimbang untuk memberikan sanksi terhadap Myanmar, Selandia Baru mengambil keputusan memutuskan hubungan diplomatik dengan Tatmadaw Myanmar serta menghentikan bantuan kepada Tatmadaw Myanmar (Amir & Melani, 2024). Krisis ekonomi juga terjadi di Myanmar pasca terjadinya kudeta. Thailand adalah salah satu negara yang memutuskan hubungan dengan Myanmar yang menjadi alasan kestabilan ekonomi di Myanmar memburuk seperti inflasi, kemiskinan, krisis perbankan, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat (Oktapia & Eresiah, 2024). Pada tahun 2021, Amerika Serikat menanggukhan *Trade and Investment Framework Agreement* (TIFA) 2013 *between the United States of America and Myanmar* sebagai bentuk sanksi terhadap pelanggaran HAM di Myanmar (Khaldun, 2021)

ASEAN, sebagai organisasi perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ikut turun andil dalam konflik yang terjadi di Myanmar. ASEAN membentuk sebuah Institusi Riset Perdamaian yang disebut dengan *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation* (AIPR) yang bertugas sebagai memfasilitasi kerjasama antar negara dan non-negara dalam mencegah dan menyelesaikan konflik melalui mekanisme regional, ASEAN berupaya memperkuat kolaborasi tanpa mengabaikan prinsip non-intervensi yang selama ini dipegang teguh (Anggraeni & Ridwan, 2025). Namun AIPR menuai pro-kontra, terutama soal prinsip non-intervensi dan pengambilan keputusan ASEAN. Kritikus menilai lembaga ini tidak relevan karena kawasan Asia Tenggara menolak mekanisme institusional yang memaksa perubahan kebijakan nasional (Anggraeni & Ridwan, 2025)

Namun AIPR terus berusaha untuk memfasilitasi perdamaian. Terdapat tiga langkah yang dilakukan oleh AIPR untuk memfasilitasi perdamaian: pertama, membangun dasar kepercayaan; kedua, mengembangkan hubungan kolaboratif yang saling menguntungkan; dan ketiga, menerapkan prinsip keadilan inklusif dalam setiap prosesnya (Anggraeni & Ridwan, 2025). Namun tetap terjadi tantangan yang dihadapi AIPR seperti keterbatasan mandat dan kewenangan AIPR, perbedaan kepentingan negara, serta kepercayaan dan legitimasi (Anggraeni & Ridwan, 2025).

ASEAN memiliki prinsip non-intervensi terhadap konflik yang terjadi di negara Asia Tenggara sehingga peran ASEAN hanya sebagai media untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan meningkatkan perdamaian antar negara maupun non-negara. Kebijakan yang dikeluarkan oleh ASEAN maupun AIPR tidak sepenuhnya mampu dilaksanakan sebab negara memiliki kebijakan masing-masing (Oktaviani & Riva, 2022). Seperti Myanmar yang berpegang teguh dengan kebijakan negaranya sehingga ASEAN hanya dapat membantu melakukan perdamaian tanpa ikut campur prinsip negara.

4. KESIMPULAN

Krisis politik yang terjadi di Myanmar pasca pemilu 2020 dan kudeta militer 2021 telah menciptakan ketidakstabilan yang kompleks, baik di tingkat nasional maupun regional. Kudeta yang dilakukan oleh junta militer pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing tidak hanya menggulingkan pemerintah yang sah tetapi juga memicu berbagai pelanggaran HAM, penindasan terhadap masyarakat sipil, dan krisis ekonomi yang parah. ASEAN, melalui mekanisme seperti AIPR, telah berupaya memediasi konflik dengan pendekatan khususnya yang non-intervensif. Namun, upaya ini terbukti kurang efektif karena keterbatasan mandat, perbedaan kepentingan negara anggota, dan prinsip kedaulatan yang dipegang teguh. Di sisi lain, tekanan internasional berupa sanksi ekonomi dan politik dari negara-negara Barat menunjukkan dampak yang lebih nyata, meskipun belum berhasil mengembalikan demokrasi di Myanmar.

Studi ini mengungkapkan pola berulang kekuasaan militer di Myanmar sejak 1962, dimana transisi demokrasi 2015-2020 akhirnya kembali digagalkan. Krisis ini juga memperlihatkan dilema ASEAN dalam menyeimbangkan prinsip non-intervensi dengan kebutuhan untuk menyelesaikan konflik. Sementara itu, penderitaan kelompok minoritas seperti Rohingya terus berlanjut, memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah ada. Untuk mengatasi situasi ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang menggabungkan tekanan internasional terkoordinasi, dialog inklusif dengan semua pemangku kepentingan, serta reformasi kelembagaan ASEAN untuk memperkuat kapasitas mediasinya. Solusi berkelanjutan hanya mungkin tercapai melalui kerjasama multilateral yang menghargai kedaulatan Myanmar namun tetap mengedepankan perlindungan HAM dan prinsip-prinsip demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. K., & Melani. (2024). Analisis kudeta militer Myanmar terhadap pemerintahan sipil ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional. *Jurnal Aktual Justice*, 9(2).
- Anggraeni, N., & Ridwan, W. (2025). Tantangan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) dalam penyelesaian konflik di Asia Tenggara tahun 2018–2023: Studi kasus penanganan konflik di Myanmar. *Jurnal Cakrawala Akademika*, 1(6), 2152–2165. <https://doi.org/10.70182/jca.v1i6.336>
- Ashadi, W. (2022). Kudeta junta militer Myanmar terhadap Aung San Suu Kyi 2021. *Auliyah: Journal of Islamic and International Affairs*, 7(2).

- Awaludin, M., Najib, M. A., & Mar'iyah, C. (2024). Konstitusi Myanmar tahun 2008: Pembagian kekuasaan antara sipil-militer pada masa pemerintahan sipil USDP (2011–2016) & NLD (2016–2021) di Myanmar. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(5).
- Fransisca, I., & Budianto, A. S. (2024). Legitimasi pemerintahan Myanmar sebagai anggota ASEAN pasca kudeta militer ditinjau dari prinsip non-intervensi hukum internasional. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1.
- Huang, K. P. (2022). Myanmar's 2020 election: Explaining the strong performance of the NLD and some ethnic parties. *Journal of East Asian Studies*, 22(2), 309–331. <https://doi.org/10.1017/jea.2022.10>
- Keumala, A. I., & Ath-Thariq, P. (2023). Perlindungan masyarakat sipil dalam konflik bersenjata di Myanmar berdasarkan sudut pandang hukum internasional. *Jurnal Jurist Argumentum (Pemikiran Intelektual Hukum)*, 1(1). <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210202083536-4-220359/memahami-kudeta-myanmar-dan-hubungan->
- Khaldun, R. I. (2021). Implikasi konflik kudeta militer Myanmar terhadap sanksi internasional. *IJPASS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies*, 3(1), 14–22.
- Oktapia, M., & Eresiah. (2024). Krisis politik Myanmar: Transformasi politik pasca kemerdekaan. *Jurnal Senja: Sejarah dan Humaniora*, 3, 8–14. <https://jurnal.uts.ac.id/index.php/jssh>
- Oktaviani, J., & Riva, L. (2022). Peran ASEAN dalam menghadapi isu pelanggaran HAM pasca kudeta militer di Myanmar tahun 2021. *JIHIF: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar*, 1(1).
- Rugian, F. E., Niode, B., & Tulung, T. E. (2022). Dinamika kehidupan demokrasi di Myanmar (Suatu studi tentang pengalihan kekuasaan oleh militer di tahun 2021). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7(2).
- Saputra, A. A., & Dewi, E. (2025). Peranan militer dalam konflik internal Myanmar pada tahun 2017–2022. *Indonesian Journal of International Relations*, 9(1), 80–96. <https://doi.org/10.32787/ijir.v9i1.644>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian, kuantitatif kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Yasa, K. P. (2022). Analisis kudeta militer Myanmar terhadap pemerintahan sipil ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2).